



Judul : Kasus Hambalang: Niat Menghadang Interpelasi Dipertanyakan
Tanggal : Rabu, 21 November 2012
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 4

KASUS HAMBALANG

Niat Menghadang Interpelasi Dipertanyakan

JAKARTA (Suara Karya): Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, mempertanyakan niat Fraksi Partai Demokrat untuk menghadang wacana penggunaan hak interpelasi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Penggunaan hak interpelasi, kata Priyo, merupakan hak setiap anggota DPR dalam rangka mengungkap kasus yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,5 triliun itu. "Penggunaan hak interpelasi wajar saja digulirkan, karena itu adalah hak anggota DPR. Wong istana saja mau hiruk pikuk, masa kita gak boleh," kata politisi Partai Golkar itu, kepada wartawan, di gedung DPR, Jakarta, Senin (19/11).

Menurut dia, penggunaan hak interpelasi, sah-sah saja dilakukan sepanjang dipandang perlu dan mendesak. Karenanya, Priyo berharap semua pihak, termasuk Fraksi Partai Demokrat menghormati penggunaan hak interpelasi.

Terkait dengan hal itu, kata Priyo, pimpinan DPR

saat ini menunggu apakah niat menggulirkan hak interpelasi itu jadi digunakan, sekaligus menunggu proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak ada salahnya kalau saja hak interpelasi itu digunakan. Ini adalah jalur politik untuk mendesak penerapan hukum menuntaskan kasus tersebut. Tapi penggunaan hak interpelasi itu, dianggap berlebihan kalau proses hukum bergerak cepat. Kalaupun begitu, ini kan hak anggota DPR. Dan kalau ini jalur yang benar, saya buka jalur ini," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Saan Mustopa menyatakan pihaknya siap mengantisipasi penggunaan hak interpelasi melalui jalur lobi di Sekretariat Gabungan (Set gab) partai koalisi.

"Kita partai di Set gab akan mengantisipasi lewat lobi politik. Tapi kita akan melihat perkembangannya dulu. Sebab, kasus Hambalang sudah ditangani KPK. Artinya, kalau ada kejangan, maka hasil telaahan BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR, ha-

rus diberikan kepada KPK," kata Saan.

Menurut Saan, DPR tidak perlu mengambil langkah politik terkait kasus yang diduga melibatkan banyak kader Partai Demokrat itu. Karena, katanya, jika kasus ini ditarik ke ranah politik, akan sulit diselesaikan.

"Tak perlulah masuk ranah politik lagi (interpelasi). Kalau ditarik ranah politik, ini tak akan kelar. Apalagi, kasus ini sudah masuk wilayah hukum yang kini ditangani KPK," kata Saan Mustopa.

Namun demikian, Panitia Kerja (Panja) kasus Hambalang Komisi X DPR, tetap berlanjut. Bahkan dalam waktu dekat akan mengambil kesimpulan. "Tak lama lagi, Panja Hambalang Komisi X DPR akan segera mengambil kesimpulan," kata anggota Panja Hambalang dari Fraksi PKS, Raihan Iskandar.

Menurut dia, kesimpulan Panja sedianya akan akan diambil pada pekan ini, namun karena belum melakukan pertemuan dengan BAKN, maka hal itu diundur menjadi pekan depan. "Tadinya kita akan bertemu dengan BAKN pekan ini. Tapi diundur minggu depan," ujarnya. (Sugandi)